



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026 : 1 – 13

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v16i1.8732

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan

Analysis of Road User Guidance Policy in an Effort to Improve Public Order in Medan City

¹Khaidir Ali; ²Lasniati

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: khaidirali@umsu.ac.id

(Diterima: 04-Juni-2026; Ditelaah: 04-Juni-2026; Disetujui: 12-Juli-2026)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan pengguna jalan, khususnya pengemudi angkutan umum, yang ditunjukkan melalui berbagai pelanggaran lalu lintas serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan berupa penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan serta masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kajian menggunakan teori implemementasi kebijakan dari Edward, yakni meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pembinaan pemakai jalan di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang efektifnya komunikasi kebijakan kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen sebagian pelaksana, serta belum optimalnya struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi infrastruktur dan tekanan ekonomi pengemudi juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan pengguna jalan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan pembinaan pemakai jalan yang efektif dan terciptanya keselamatan serta ketertiban lalu lintas di Kota Medan.

Kata kunci : implementasi kebijakan, lalu lintas, pembinaan masyarakat, pengguna jalan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the City of Medan's policies to improve the discipline and compliance of road users, particularly public transportation drivers, as evidenced by various traffic violations and the suboptimal implementation of guidance

Khaidir Ali; Lasniati (2026). Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan

programs such as counseling, education, and training. This study employs a descriptive method with a qualitative analysis approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation with informants from the Medan City Transportation Agency and the general public. Data analysis utilizes an interactive model encompassing data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis of the study utilized Edward's policy implementation theory, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results indicate that the implementation of Local Regulation No. 9 of 2016 on the guidance of road users in the City of Medan has not been optimal. This is due to several factors, including ineffective communication of the policy to the public, limited resources, low commitment among some implementers, and an underdeveloped bureaucratic structure in supporting policy implementation. In addition, external factors such as infrastructure conditions and the economic pressures faced by drivers also influence road users' compliance rates. Therefore, efforts are needed to increase public awareness, strengthen enforcement, improve facilities and infrastructure, and enhance interagency coordination in order to effectively educate road users and ensure traffic safety and order in the city of Medan.

Keywords: *policy implementation, traffic, road users, community development*

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang berperan sebagai sarana utama mobilitas manusia dan distribusi barang dan jasa. Transportasi sangat membantu pembangunan, terutama dalam perekonomian masyarakat dan perkembangan daerah atau wilayah, baik perkotaan atau perdesaan (Ali, 2023). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan pergerakan yang cepat, aman, dan efisien menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di jalan raya yang tidak selalu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan sistem pengelolaan lalu lintas yang memadai. Peningkatan volume kendaraan tersebut tidak hanya berdampak pada kepadatan arus, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan serta menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan (Annisssa & Suherman, 2026). Dalam bidang angkutan jalan, penyelenggaraan mencakup pengaturan angkutan umum agar memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi masyarakat, sekaligus menekan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Secara keseluruhan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sekaligus menjaga keselamatan serta ketertiban di jalan raya.

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia adalah masalah keselamatan lalu lintas yang kian memburuk dari tahun ke tahun, yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas (Rany et al., 2025). Perkembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar tercipta kondisi yang aman, tertib, lancar, dan terpadu. Implementasi hukum lalu lintas dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk mengatur dan menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya

Khaidir Ali; Lasniati (2026). Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan

(Andilolo et all, 2024). Ketentuan diatas sejalan dengan semangat Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di Kota Medan. Penyelenggaraan lalu lintas tidak hanya berfokus pada aspek fisik jalur, rambu, marka, dan kendaraan, tetapi juga menekankan pada komponen sumber daya manusia sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Peraturan daerah ini secara tegas mengamanatkan bahwa pembinaan terhadap pemakai jalan, termasuk pengemudi angkutan umum, seharusnya dilakukan melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan latihan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Tentu, dengan adanya prosedur kerja tentu akan banyak memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ali et al., 2023).

Meskipun ketentuan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum telah diatur dalam Pasal 85 Perda No. 9 Tahun 2016, kondisi implementasi ketentuan tersebut di Kota Medan selama periode beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara teks norma dengan realitas praktik di lapangan. Secara tatakelola, peraturan daerah ini telah diposialisasikan dan menjadi dasar bagi pembinaan lalu lintas, namun berbagai kajian implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah secara umum belum optimal dalam menjawab sejumlah persoalan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan. Lalu lintas merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas pembangunan daerah (Hartono et al., 2026).

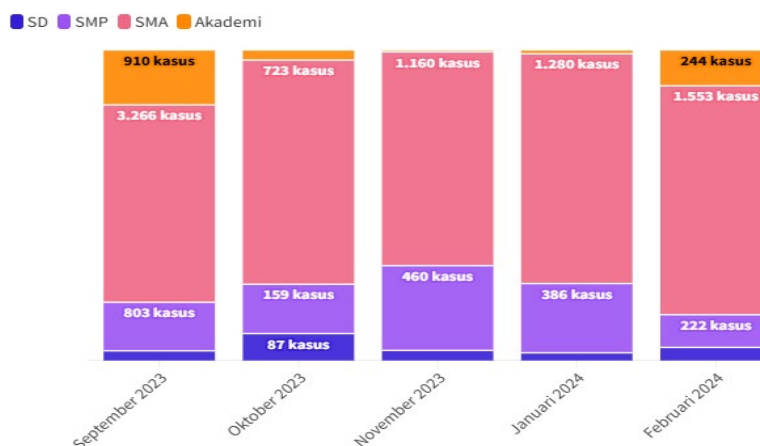
Kondisi infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala bagi pengemudi sehingga mereka berhenti di sembarang tempat. Ketika fasilitas seperti area parkir, tempat berhenti sementara, atau titik naik- turun penumpang tidak tersedia atau tidak memadai, pengemudi sering kali merasa tidak punya pilihan selain berhenti di lokasi yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Desain jalan yang sempit, tidak adanya bahu jalan, serta rambu dan marka yang kurang jelas juga membuat pengemudi kesulitan menentukan tempat berhenti yang aman dan sesuai aturan. Selain itu, fasilitas transportasi umum yang kurang nyaman atau terlalu jauh sering mendorong penumpang meminta turun di sembarang titik, yang akhirnya diikuti oleh pengemudi. Hal itu juga penting untuk mengakui bahwa jalan raya adalah ruang bersama yang dihuni oleh beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda (Dewantara et al., 2024). Meskipun begitu, perilaku pengemudi dan lemahnya penegakan aturan juga berperan, sehingga masalah berhenti sembarangan tidak hanya disebabkan oleh infrastruktur, tetapi oleh kombinasi beberapa faktor. Peristiwa-peristiwa tersebut juga menimbulkan kemacetan dan kecelakaan pada jalan-jalan yang merupakan bagian dari kelalaian dan kelengahan atas penggunaan ruang publik, dalam hal ini adalah jalan raya (Rochim, 2019).

Angkutan umum yang tidak layak yang masih beroperasi merupakan masalah tambahan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesadaran pelaku usaha angkutan umum tentang pentingnya mematuhi peraturan keselamatan. Kendaraan yang tidak layak jalan meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan layanan. Perbaikan sosialisasi dan pendidikan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan infrastruktur, dan insentif untuk pengemudi yang patuh adalah semua langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk memastikan transportasi umum yang aman, nyaman, dan tertib di Kota Medan, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat harus

bekerja sama.

Salah satu yang menjadi faktornya adalah rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum. Jalan raya adalah ruang bersama yang dihuni oleh beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda (Dewantara et al., 2024). Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Medan, tingkat kepatuhan pemakai jalan raya sebanyak 40%. Berdasarkan berita (okemedan.com, 2025), menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Operasi Patuh Toba digelar selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 juli 2025. Tercatat total 26.096 penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terdiri dari Etle statis 763 pelanggar, Etle Mobile 1.536 pelanggar, tilang manual 9.785 pelanggaran dan teguran 14.012 tindakan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengemudi tidak mematuhi aturan dalam lalu lintas, seperti berhenti sembarangan, melanggar rambu lalu lintas, melawan arus dan tidak mengontrol batas maksimum. Selain itu, adanya faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi perilaku pengemudi. Dimana para pengemudi memiliki target dan tekanan untuk mendapatkan penumpang dan penghasilan dalam waktu singkat sehingga mendorong para pengemudi tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi mengejar terget dan penghasilan. Situasi ini menimbulkan persaingan yang ketat antara pengemudi dan pelaksana angkutan umum. Dalam ranah publik menjaga ketertiban termasuk dalam salah satu asas aturan yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum (Jannah et al., 2022).

Dalam (kumparanNEWS, 2024) Polrestabes Medan melaporkan berdasarkan Analisa dan Evaluasi Pelanggaran dalam Lalu Lintas di Wilayah Hukum tahun 2023 dan 2024, lulusan SMA menjadi pengendara yang paling banyak melanggar lalu lintas. Sementara, lulusan SD paling sedikit melanggar lalu lintas.



Gambar 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan Berdasarkan Pendidikan

Sumber: <https://kumparan.com/kumparannews/ada-26-ribu-pelanggaran-lalin-di-medan-dalam-6-bulan-siapa-terbanyak-melanggar-22IgPskdpq9/full>

Berdasarkan berita Mistar.id Terpercaya dan Akurat menyampaikan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengemudi angkutan umum dan pengendara sepeda motor di kota Medan. Perilaku yang dapat dilihat ketidakpatuhan terhadap rambu dan marka jalan, pemberhentian yang tidak semestinya, serta kurangnya

disiplin dalam mengemudi. Permasalahan selanjutnya juga harus diatasi pada sektor transportasi darat adalah tingginya sifat egois dan tidak beretika dari sebagian pengguna jalan yang sering mengakibatkan terjadinya risiko tinggi (Amaliyah et al., 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku individu tidak mencerminkan nilai etika dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan masalah bagi keselamatan bagi pengguna jalan. Untuk itu, pentingnya pembinaan secara berkala yang dilakukan oleh dinas terkait dan petugas untuk meminimalkan pelanggaran dalam lalu lintas, sehingga meningkatkan ketertiban bagi masyarakat. Adanya pembinaan dalam bentuk program-program secara berkala bagi pengguna jalan akan menciptakan pola pikir tentang pentingnya keselamatan pengguna dari pada melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap pentingnya perubahan pola pikir masyarakat untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas melalui pembinaan yang terkontrol dan terprogram secara berkelanjutan melalui teori Edward terkait indikator dalam implementasi kebijakan publik yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini menjadi indikasi bahwa pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum yang seharusnya diimplementasikan melalui penyuluhan, pendidikan, dan latihan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah belum optimal menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pemakai Jalan di Kota Medan dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap pemakai jalan guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

B. METODE

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019). Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dan proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dan peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Tabel 1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Pendidikan	Keterangan
1.	Farhan Husein, S. Tr.Tra	D4 Transportasi Darat	Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Sofyan Ardiansyah,S.Kom	S1 Ilmu Komputer	Staf PpdanK
3.	Dimas Dwikatama	D4 Transportasi Darat	Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4.	David Junaidi	SMA	Masyarakat
----	---------------	-----	------------

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 3 bulan dan lokasi penelitian pada Dinas Perhubungan, Jl. Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Adanya Komunikasi Dalam Pembinaan Pemakai Jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan dalam mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus diimplementasikan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan oleh Dinas Perhubungan telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan metode informatif, persuasif, dan edukatif. Komunikasi langsung dilakukan melalui sosialisasi di lapangan, teguran kepada pelanggar, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti *safety riding* bagi pengemudi. Sementara itu, komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial, media massa, serta komunikasi visual berupa rambu-rambu, marka jalan, baliho, dan papan informasi. Partisipasi masyarakat juga merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut (Pramawati et al., 2024).

Selain itu, terdapat inovasi dalam bentuk pemanfaatan teknologi *Intelligent Transport System* (ITS) yang dilengkapi kamera pengawas, videotron, dan pengeras suara. Teknologi ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara *real-time* serta pemberian teguran langsung kepada pelanggar, sehingga dinilai efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Implementasi komunikasi juga didukung dengan kegiatan yang berkelanjutan, seperti sosialisasi rutin, kampanye keselamatan jalan, serta pelatihan bagi pengemudi angkutan umum. Pentingnya tertib pada peraturan lalu lintas agar dapat berjalan sesuai harapan, tentunya sebuah lembaga harus memiliki atau membuat strategi dalam mengkomunikasikan pada masyarakat (Jannah et al., 2022).

Secara umum, implementasi komunikasi sudah dibangun sebelumnya dan sudah berjalan semestinya namun masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti program diklat yang dilaksanakan masih belum bersifat rutin dan hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya perhatian terhadap himbauan, tidak meratanya penyebaran informasi, perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman, serta metode komunikasi yang masih cenderung satu arah dan kurang menarik. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum merasakan secara langsung manfaat dari kegiatan sosialisasi karena keterbatasan jangkauan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi melalui sosialisasi yang lebih merata dan berkelanjutan, pemanfaatan media digital secara lebih optimal, penggunaan metode komunikasi yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami, serta pelibatan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan masyarakat. Pendekatan yang lebih humanis dan persuasif juga diperlukan agar masyarakat tidak

merasa tertekan, tetapi lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Karena melalui komunikasi berbagai informasi keselamatan dapat disampaikan ke masyarakat (Gunawan & Susilowati, 2021).

Dengan demikian, bahwa dalam pembinaan pemakai jalan telah berjalan dengan baik dan didukung oleh berbagai metode serta pemanfaatan teknologi modern seperti ITS. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan pemahaman masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi komunikasi yang lebih inovatif, merata, dan partisipatif agar dapat meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas.

2. Adanya Sumber Daya Dalam Pembinaan Pemakai Jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksanaannya masih kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tujuan keseluruhan MSDM adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai kesuksesan melalui sumber daya manusianya (Prabowo et al., 2024).

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam mendukung pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembinaan pemakai jalan pada dasarnya sudah cukup memadai, namun belum sepenuhnya optimal. Dari segi fasilitas, telah tersedia berbagai sarana pendukung seperti *Intelligent Transport System* (ITS) yang dilengkapi kamera pengawas, serta penyediaan transportasi umum seperti bus listrik yang mendukung kebijakan pengurangan kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai sarana pendukung lainnya, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas, seperti kondisi rambu-rambu, marka jalan, penerangan, dan infrastruktur jalan yang belum merata dan optimal di beberapa titik. Dari segi sumber daya manusia (SDM), pegawai Dinas Perhubungan pada umumnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seperti melakukan pengawasan lalu lintas, penertiban pelanggaran, sosialisasi kepada masyarakat, pengoperasian sistem ITS, serta penyusunan laporan dan evaluasi. Petugas juga aktif turun langsung ke lapangan untuk mengatur lalu lintas, khususnya di titik-titik rawan kemacetan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan. Selain itu, dalam kegiatan pelatihan, juga didukung oleh tenaga profesional yang kompeten dan bersertifikasi.

Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam aspek sumber daya. Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya kepadatan lalu lintas, sehingga belum semua wilayah dapat dijangkau secara maksimal. Tingginya beban kerja pegawai juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran serta belum meratanya fasilitas pendukung turut mempengaruhi efektivitas pembinaan. Di sisi lain, karakter masyarakat yang cenderung sulit diatur dan mempertahankan kebiasaan lama juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sumber daya secara menyeluruh, baik dari segi jumlah maupun kualitas

SDM melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya penambahan fasilitas pendukung, penguatan anggaran, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan pembinaan pemakai jalan.

Secara keseluruhan, sumber daya dalam mendukung pembinaan pemakai jalan sudah cukup memadai, namun masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah SDM, fasilitas, dan anggaran, serta tantangan dari faktor masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya, penambahan fasilitas, serta penguatan dukungan anggaran dan koordinasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang maksimal.

3. Adanya Program Dalam Pembinaan Pemakai Jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan tindakan terhadap pemikiran dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana harus mencerminkan komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki tujuan yang baik, tentu akan dapat dijalankan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika petugas pelaksana mencerminkan sikap atau perspektif yang berbeda justru akan berdampak pada proses implementasi kebijakan yang kurang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan program-program persuasif untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin lalu lintas (Hotmanian, 2018).

Program pembinaan pemakai jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan telah dilaksanakan melalui berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, edukasi, dan pelayanan transportasi. Kegiatan pembinaan ini sebagai wujud pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Fajrah et al., 2023). Salah satu strategi utama adalah pembentukan Tim Cakrawala dan Tim Cendrawasih, yang memiliki tugas khusus di lapangan, seperti patroli, penertiban pelanggaran, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tim Cakrawala lebih fokus pada pengawasan dan penertiban, sedangkan Tim Cendrawasih berperan dalam pembinaan edukatif dan persuasif. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memanfaatkan teknologi seperti *Intelligent Transport System* (ITS), kamera pengawas, videotron, serta media sosial untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya untuk mengatasi kendala ini Dinas Perhubungan Kota Medan harus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap aturan (Sahriani, 2024).

Program transportasi umum berupa bus listrik dan persiapan jalur *Bus Rapid Transit* (BRT) juga menjadi bagian dari upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Hal ini, menunjukkan bahwa transportasi bertujuan untuk menyediakan sarana yang efisien dan efektif dalam memindahkan orang, barang, atau jasa (Putri, 2022). Meskipun implementasi program berjalan cukup baik, kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, belum meratanya jangkauan layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung masih memengaruhi efektivitas program. Beberapa program juga belum konsisten dan berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap disiplin berlalu lintas belum optimal. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas tim melalui penambahan personel, pelatihan berkelanjutan, dukungan sarana-prasarana, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Karena, ada beberapa komponen dasar yang berfungsi pada semua sistem transportasi (Puspitasari et al., 2024). Hal ini sangat berpengaruh pada setiap proses yang berlangsung.

Secara keseluruhan, program pembinaan pemakai jalan oleh Dinas Perhubungan sudah cukup komprehensif dengan memadukan pengawasan, edukasi, dan inovasi teknologi, serta dukungan transportasi umum. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor SDM, fasilitas, jangkauan layanan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tim, konsistensi pelaksanaan program, penguatan sarana-prasarana, serta koordinasi lintas instansi agar program dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

4. Adanya Sasaran Dalam Pembinaan Pemakai Jalan

Menurut Edward dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa dalam tatanan dalam penugasan terhadap pelaksana kebijakan harus memiliki pengaruh yang berdampak pada implementasi kebijakan. Struktur organisasi mempengaruhi aspek dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Proses struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang lebih rumit dan kompleks serta menjadikan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Sasaran pembinaan pemakai jalan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, termasuk pengendara sepeda motor, pengendara mobil pribadi, pengemudi angkutan umum, pejalan kaki, serta pelajar dan mahasiswa sebagai target jangka panjang. Pengemudi angkutan umum menjadi sasaran utama karena tanggung jawab mereka terhadap keselamatan penumpang dan keterlibatan sehari-hari di jalan raya. Kebijakan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pengguna jalan juga menjadi bagian integral dari upaya-upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Dewantara et al., 2024). Bentuk pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan khusus, pengawasan di lapangan, dan penertiban pelanggaran, serta dukungan media sosial dan kampanye publik. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan melanggar yang sudah dianggap biasa, jangkauan sosialisasi yang belum merata, serta pengawasan yang masih terbatas. Tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi; beberapa masyarakat mulai menunjukkan disiplin seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan kepatuhan terhadap rambu, namun pelanggaran masih sering terjadi, terutama pada pengendara sepeda motor dan sebagian pengemudi angkutan umum. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara lebih intensif, terstruktur, berkelanjutan, dan disertai penegakan hukum yang tegas, serta melibatkan generasi muda agar tercipta budaya tertib berlalu lintas. Regulasi yang jelas juga harus ditegakkan dengan baik untuk menjaga keteraturan dan keselamatan di jalan raya (Dewantara et al., 2024).

Secara keseluruhan, sasaran pembinaan pemakai jalan mencakup seluruh pengguna jalan dengan fokus pada kelompok yang paling berisiko atau berpengaruh terhadap keselamatan, seperti pengemudi angkutan umum dan pengendara sepeda motor. Pedoman dalam Penggunaan Kendaraan Bermotor dalam Keselamatan Berlalu Lintas bahwa perlu adanya pemahaman bagi masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor karena dapat menjaga keselamatan bagi diri sendiri bahkan bagi orang lain (Fajrah et al., 2023). Meski program pembinaan sudah berjalan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan, efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran

masyarakat, jangkauan belum merata, dan pengawasan yang belum terlaksana optimal. Keterbukaan akses informasi publik kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipatif untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat (Solehah & Aprianjani, 2019). Oleh karena itu, pembinaan perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih intensif, konsisten, edukatif, dan disertai penegakan aturan yang tegas agar ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dapat tercapai secara maksimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulkan dalam kebijakan pembinaan pemakai jalan di Kota Medan yang dianalisis dengan adanya komunikasi, adanya sumber daya, adanya program dan adanya sasaran telah terimplementasi namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian, yaitu:

1. Komunikasi dalam pembinaan pemakai jalan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, komunikasi diwujudkan melalui sosialisasi di lapangan, teguran, pengawasan, pelatihan pengemudi, dan kegiatan edukatif seperti *safety riding* bagi pengemudi angkutan umum dan bus listrik. Secara tidak langsung, komunikasi dilakukan melalui media sosial, website resmi, baliho, spanduk, videotron, CCTV, dan sistem *Intelligent Transport System (ITS)* yang memungkinkan penyampaian informasi secara real-time. Pendekatan komunikasi ini bersifat edukatif, persuasif, dan informatif, yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih terbatas oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, jangkauan sosialisasi yang belum merata, serta penyampaian pesan yang kadang satu arah.
 2. Dinas Perhubungan memiliki tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas yang cukup mendukung pelaksanaan pembinaan. Pegawai aktif turun kelapangan untuk pengawasan, penertiban, sosialisasi, dan pengoperasian sistem ITS. Namun, keterbatasan jumlah personel dan kualitas SDM menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah, sehingga pembinaan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, fasilitas pendukung seperti marka jalan, rambu-rambu, dan penerangan juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan personel, serta peningkatan sarana dan koordinasi antarinstansi menjadi hal penting untuk mendukung efektivitas pembinaan.
 3. Program-program yang dijalankan juga telah beragam dan konsisten, termasuk pembentukan Tim Cakrawala dan Tim Cendrawasih untuk pengawasan dan edukasi, operasi tertib lalu lintas, kampanye keselamatan berkendara, penyediaan bus listrik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta pembuatan konten edukatif di media sosial dan videotron. Program-program ini dilakukan secara berkelanjutan dan rutin, meskipun beberapa masih
- Khaidir Ali; Lasniati (2026). Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan*

menghadapi kendala seperti keterbatasan personel, jangkauan layanan yang belum merata, dan gangguan operasional seperti banjir. Beberapa program baru juga sedang dipersiapkan, seperti jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT) yang dilengkapi pembatas fisik agar tidak disalahgunakan. Sasaran pembinaan mencakup seluruh pengguna jalan, mulai dari pengendara sepeda motor dan mobil pribadi, pengemudi angkutan umum, pejalan kaki, hingga pelajar dan mahasiswa. Fokus utama diberikan pada pengemudi angkutan umum dan pengendara sepeda motor karena peran mereka yang besar dalam keselamatan lalu lintas. Pembinaan difokuskan pada kepatuhan terhadap aturan, keselamatan penumpang, ketaatan terhadap trayek, serta etika berkendara. Kendala yang ditemukan antara lain rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, kebiasaan melanggar yang sudah dianggap biasa, dan pengawasan yang belum optimal, sehingga tingkat kepatuhan masih bervariasi.

E. REKOMENDASI

1. Sebagai pertimbangan dan alternatif untuk membuat kebijakan dalam penggunaan jalan raya di Kota Medan
2. Menjadi masukan bagi Dinas Perhubungan dalam menyiapkan Program yang lebih efektif dan sesuai prosedur penggunaan jalan raya
3. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap penggunaan jalan raya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. (2023). Optimalisasi Layanan Operasional Bus Trans Binjai Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(1), 17-24. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3586>
- Ali, K., Meliala, W. S., & Sinaga, C. N. (2023). Peran Pemerintahan Mukim Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 4(2), 77-86. <https://doi.org/10.30596/jisp.v4i2.14276>
- Amaliyah, A., Aris, U., Wijonarko, G., & Priyanto, E. (2023). Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia di Sektor Transportasi Dalam Menyambut Era Society 5.0 di Indonesia. *Warta Penelitian Perhubungan*, 35(1), 85-94. <https://doi.org/10.25104/warlit.v35i1.2215>
- Andilolo J.P et all. (2024). 2135-Article Text-10343-1-10-20240728. 6(4), 11717-11729.
- Annissa, A., & Suherman, N. (2026). REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENERTIBAN GOVERNANCE. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 1(1), 1-10.
- Creswell, W. J. (2019). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* (Edisi Keem). Pustaka Pelajar.
- Dewantara, B. A. P., Aryana, W. P. S. I., & Dewi, I. D. L. C. (2024). Tinjauan Terhadap Khaidir Ali; Lasniati (2026). Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan

- Kebijakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-hak Pengguna Jalan. *Rio Law Jurnal*, 2(5), 2024–2722. <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- Fajrah, N., Zetli, S., Rasid Ridho, M., & Wahda Wahdi, Y. (2023). Pembinaan Panduan Pengguna Kendaraan Bermotor untuk Keselamatan Berjalan Lintas pada Siswa Yayasan Sahabat Cendikia. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/10.33884/jpb.v4i2.5539>
- Gunawan, & Susilowati, I. H. (2021). Efektivitas Komunikasi Keselamatan Pada Pekerja Di Lapangan Produksi Minyak Dan Gas Pt Xyz. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 536–544.
- Hartono, D., Lestari, A., Susanti, E., & Sanyoto, Y. W. (2026). *Strategi dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu dalam tata kelola lalu lintas di kecamatan baturaja timur*. 3, 1368–1372.
- Hotmanian, M. (2018). Komunikasi Persuasif Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resort Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Berjalan Lintas Melalui Program Police Goes To School Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/204149-kesiapan-petani-kelapa-sawit-dalam-mengh.pdf>
- Jannah, M., Fatra Deni, I., & Rozi, F. (2022). Strategi Komunikasi Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Balai Dalam Meningkatkan Tertib Lalu Lintas. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2691–2698. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.416>
- Prabowo, B., Samsuddin, A., Agus Setiawan, W., Faisa Ramadhani, N., Kerysso Naoki, E., & Ammarullah, N. (2024). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. *IndOmera*, 5(9), 52–60. <https://doi.org/10.55178/idm.v5i9.336>
- Pramawati, F., Suaib, E., & Qomariyah, E. (2024). *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023*. 15(2), 171–182.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Puspitasari, A., Nanang, S., & Muhtadi, Y. (2024). Inovasi Sektor Publik Dalam Layanan Transportasi Publik Di Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Layanan Transportasi Umum “Si Benteng”). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 57–68.
- Putri, N. I. P. (2022). Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi di Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v8i1.1249>
- Rany, S., Aisyah, D., & Sciences, P. (2025). *Jurnal Kebijakan Publik Collaboration for Safety : Analysis of Collaborative Governance in Traffic Management*. 16(1), 78–85.
- Rochim, A. I. (2019). Studi Pemetaan Kebijakan Perhubungan Jalan Di Indonesia. *Dia*, 17(1), Khaidir Ali; Lasniati (2026). *Analisis Kebijakan Pembinaan Pengguna Jalan Raya dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Kota Medan*

1-26. <https://doi.org/10.30996/dia.v17i1.2693>

Sahriani, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan*. 4(1), 1-12.

Solehah, N., & Aprianjani, C. (2019). Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 11(1), 1-14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI